

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Diskusi mengenai lingkungan akhir ini menjadi vital di masyarakat. Tentu bukan saja karena apa yang dialami masyarakat secara langsung terhadap kondisi lingkungan yang mulai memburuk, tetapi juga mencuatnya pemberitaan mengenai lingkungan seperti deforestasi, polusi udara, polusi air, pencemaran laut, perubahan iklim, peningkatan permukaan air laut, polusi plastik, hingga penambangan dari pemberitaan media, baik massa maupun media sosial begitu masif. Namun jika diperhatikan, masalah lingkungan sebenarnya telah jauh dibahas dalam wacana pembangunan sejak 1970-an. Sampai akhir 1980-an, permasalahan ini mendorong berbagai negara di dunia untuk merumuskan kebijakan pembangunan yang lebih adil dan berkelanjutan. Penggunaan kalimat retorik seperti ‘masalah’ dan ‘krisis’ telah memberikan kemungkinan besar untuk memikirkan kembali pilihan-pilihan kebijakan yang berkaitan dengan lingkungan dan pembangunan (Kurniawan, 2012).

Namun alasan retorik seperti ‘masalah’ dan ‘krisis’ agaknya tidak dibarengi dengan paradigma yang cukup proporsional dalam memahami isu lingkungan hidup. Berbagai kebijakan dari level global maupun regional dibuat, tetapi tidak sedikit kebijakan tersebut justru kembali jatuh kepada antroposentris, yang menyebabkan krisis lingkungan hidup. Kebijakan yang salah kaprah ini membuat manusia mengalami keterpisahan dengan alamnya. Vandana Shiva (2023) menyebut ini sebagai “Apartheid Ekologis”. Ini merupakan perang terhadap bumi yang didasarkan pada ambisi ekonomi yang gagal memahami batas antara ekologi dan etik. (Shiva, 2023). Padahal sebagai manusia, secara biologis, kita bersatu padu dengan bumi. Bukan sebaliknya sehingga menciptakan hubungan tidak seimbang dan dehumanisasi. Dalam hal ini, lingkungan cenderung didekati oleh dominasi maupun kontrol. Bukan berdasarkan sikap mutual, hormat, dan dialogis (Keraf, 2014).

Di Indonesia, permasalahan lingkungan, khususnya pertambangan merupakan konsekuensi dari logika pembangunan. Logika ini menjadi batu loncatan pemerintah untuk pertumbuhan dan stabilitas ekonomi dengan berbagai kebijakan, tidak terkecuali dengan merevisi UU Minerba dan Batubara (UU Minerba) dan UU Cipta Kerja di tahun 2020. Ini berguna untuk mendorong pemulihan ekonomi dengan jalan menjadikan UU Minerba dan UU Cipta Kerja sebagai instrumen hukum guna memuluskan sistem investasi di Indonesia (Muslim & Najicha, 2022).

Investasi diklaim sebagai peluang akumulasi keuntungan. Namun, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) misalnya, melaporkan jika pada tahun 2023, kebijakan pangan pemerintah bernama *food estate* atau lumbung pangan sebenarnya telah membuat kerusakan lingkungan. Deforestasi besar-besaran di wilayah *food estate* membuat Indonesia kehilangan hutan utama berkisar 290 ribu hektare. Tentunya konteks ini mengidentifikasikan Indonesia sebagai kategori negara yang paling tinggi kehilangan hutan di dunia (WALHI, 2025).

Kompleksitas permasalahan isu lingkungan yang lain, isu pertambangan di Indonesia tidak bisa dimengerti dalam konteks lingkungan saja. Karena hakikatnya punya konektivitas dengan masalah ekonomi, politik, budaya maupun sosial, baik yang terjadi di darat maupun di laut. Di Maluku, wilayah yang menghimpun segala macam suku dari berbagai daerah sejak era kolonial (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, 1999) pun merasakan berbagai dampak sosial terkait dengan isu tersebut. Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara misalnya, industri nikel Indonesia Weda Bay Industrial Park (PT IWIP) memainkan peran cukup besar terhadap masalah sosial dan lingkungan. Meskipun di sisi lain PT IWIP seolah membawa secercah harapan ekonomi bagi masyarakat sekitar, tetapi proses industrialisasi yang dijalankannya tidak seindah tawaran kehidupan layak bagi masyarakat terdampak (Saputra et al., 2023).

Di Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB), Provinsi Maluku Tengah, terdapat

pertambangan nikel di Gunung Tinggi Talaga Piru yang dilakukan oleh PT Manusela Prima Mining (MPM). Semula industri PT MPM ini diduga kuat beroperasi secara ilegal. Dikutip dari laman TerasMaluku.Com (2018), selain berstatuta sengketa, pihak pemerintah SBB juga tidak tahu menahu soal aktivitas ilegal yang masih aktif dilakukan PT MPM tersebut. Namun dalam laman berita TitaStory.id, PT MPM ini sebenarnya legal secara hukum. Buktinya, permasalahan sengketa gugatan perdata kawasan industri nikel di Gunung Tinggi dan Taman Jaya, Desa Piru, antara PT MPM dan PT Bina Sewangi Raya dimenangkan pihak PT MPM setelah dilakukan proses Peninjauan Kembali (PK) oleh Mahkamah Agung. Keputusan ini terdapat pada surat Mahkamah Agung Nomor 326/PK/PDT/2024 tertanggal 24 Juli 2024. Meski begitu masih terjadi penolakan dari masyarakat sekitar dengan pihak PT MPM ini. Hal ini diakibatkan tidak adanya sosialisasi analisis dampak lingkungan hidup (Amdal) terhadap masyarakat sekitar.

Di Maluku, permasalahan pertambangan menjadi penting. Apalagi di setiap kabupaten, Provinsi Maluku, potensi sumber daya alam melimpah. Maka peran media, baik massa ataupun online punya kontribusi lebih untuk mengontrol lingkungan dari skala pra-kebijakan hingga bagaimana kebijakan itu bekerja. Kebutuhan akan media alternatif harus dipikirkan di samping ketergantungan pada media mainstream. Sebagai contoh, kehadiran media online lokal seperti TitaStory.id yang berbasis di Maluku sejak 2020 bisa menjadi 'villain' bagi media lokal mainstream. Dengan moto "independen dan suarakan kebenaran", TitaStory.id menjadi pilihan saluran yang mampu mengontrol berbagai isu, termasuk isu lingkungan. Berangkat dari kata "tita" (bahasa Ibu Maluku) yang berarti pesan, dan "story" yang berarti cerita, maka filosofi TitaStory mencerminkan visi dan misi dalam memberikan pesan-pesan penting dalam pakem jurnalistik untuk masyarakat dengan mengangkat suara terpinggirkan (Redaksi, 2020).

Selain mengangkat suara terpinggirkan, TitaStory.id juga kerap kali menyoroti isu pertambangan yang terjadi di Maluku, baik provinsi Maluku, maupun provinsi Maluku Utara. Ini mengindikasikan jika TitaStory punya konsen pada jurnalisme lingkungan. Jurnalisme lingkungan adalah pemberitaan yang konsen pada isu lingkungan dengan mendorong kebijakan yang tepat, justru paling dibutuhkan. Berdasarkan sejarahnya, jurnalisme lingkungan muncul sekitar tahun 1960-an di dunia Barat. Dimana pada saat itu implikasi antara ilmu pengetahuan dan militeristik, serta hubungan ilmu pengetahuan dengan polusi kimia, menjadi perhatian utama. The New York Times, media arus utama di Amerika Serikat umpamanya, mulai mengerjakan para koresponden lingkungan hidup di tahun 1969, dan beberapa organisasi lain mulai mengekor (Robbins, 2024).

Namun tentu persoalan isu lingkungan pada umumnya memang rumit. Peliputan soal lingkungan bukan saja konsen pada apa yang terjadi, melainkan strategi dalam memahami kompleksitas lingkungan itu sendiri. Makanya dalam dunia jurnalisme lingkungan, ada beberapa organisasi menginisiasi agar jurnalis yang konsen pada isu lingkungan mampu memahami kompleksitas tersebut. Tahun 1992, Center of Journalism, yang diisi oleh para akademisi hingga praktisi media mulai memikirkan perlunya standar etik dalam jurnalisme lingkungan. Beberapa tahun kemudian, *code of ethics* dalam sebuah World Congress of Environmental Journalis, di Sri Lanka, menyetujui 8 poin penting dalam jurnalisme lingkungan. Pertama, jurnalis lingkungan wajib memberi informasi kepada masyarakat mengenai ancaman terhadap lingkungan baik itu dalam skala global, regional, ataupun lokal. Kedua, tujuan jurnalis adalah meningkatkan kesadaran masyarakat terkait isu lingkungan. Jurnalis pun harus berupaya memberitakan dari berbagai perspektif terkait dengan lingkungan tersebut.

Ketiga, tugas jurnalis tidak saja membangun kesadaran masyarakat terkait hal yang menjadi ancaman bagi lingkungan mereka, namun menempatkannya sebagai upaya pembangunan. Jurnalis harus memberikan solusi konkret soal isu lingkungan. Keempat, jurnalis harus memiliki komitmen untuk menjaga jarak dan tidak berpihak pada kepentingan. Jurnalis harus menulis dari berbagai persepektif, paling utama adalah yang kontroversi. Kelima, jurnalis hendaknya menghindari informasi maupun komentar yang spekulatif dan tendesius.

Jurnalisme harus terus memverifikasi keotentikan informasi, baik itu datang dari industri, pemerintah, maupun aktivis lingkungan. Keenam, jurnalis lingkungan sebaiknya mengupayakan keadilan akses informasi dan memberikan layanan bantuan kepada pihak-pihak untuk memperoleh informasi. Ketujuh, jurnalis wajib menghormati hak individu yang terdampak kerusakan lingkungan, bencana alam, ataupun sejenisnya. Kedelapan, jurnalis lingkungan sepatutnya tidak menyembunyikan informasi yang memuat sebuah kebenaran, atau membangun pendapat umum masyarakat dengan menganalisis satu sisi terkait (Dewi, 2011).

Kode etik jurnalistik lingkungan yang sepakati Center of Journalism bisa menjadi acuan baik bagi kerja-kerja jurnalistik di seluruh dunia terkhususnya mengenai isu lingkungan. Tetapi, kode etik tersebut mau tidak mau harus dibarengi dengan konsen mendalam terkait dengan isu lingkungan yang begitu kompleks dan sulit. Menurut Sachman, Greenberg, dan Gochfield (1987) (dalam Florida & Rademakers, 2004), salah satu karakteristik dari pemberitaan lingkungan hidup ialah bahwa informasi terkait lingkungan tidaklah gampang diperoleh dan dipahami. Jika dikomparasikan pemberitaan TitaStory.id dengan media online nasional yang meliput isu lingkungan di Maluku seperti Kompas.id, kecenderungan untuk melihat lingkungan secara kompleks dan kritis tampak berbeda dari segi kedalaman.

Meski terdapat komparasi mengenai kedalaman pemberitaan, namun baik TitaStory.id dan Kompas.id tidak memiliki perbedaan dari segi tema, sebab keduanya menyoroti isu pertambangan. Namun, sebagaimana penelitian Remotivi mengenai wacana tersebut, dalam hal ini liputan media terkait transisi energi di Indonesia, bisa menjadi contoh bagaimana kedangkalan dan bias media online atau jurnalisme online mendalami isu lingkungan. Berdasarkan tinjauan Remotivi, total berita yang diteliti sebanyak 263 dari 10 media online di 5 Provinsi yang berbeda, yakni DKI Jakarta dan sekitarnya (Jabodetabek), Sumatera Selatan, Maluku Utara, dan Sulawesi Tengah. Selain hanya berkutat pada pemberitaan retorik “investasi” dan “proyek”, yang menandakan kedangkalan dalam mengulik lebih jauh soal kompleksitas wacana transisi energi terbarukan, 90% pemberitaan pun berpusat pada elit, yakni pemerintah dan perusahaan. 53% pemberitaan mengambil perspektif perusahaan baik swasta maupun nasional seperti Badan Usaha Milik Negara (BUMN), sedangkan 40% berasal dari pemerintah (Remotivi, 2024).

Tabel 1. Judul Pemberitaan Lingkungan TitaStory.id dan Kompas.id, 2025

TitaStory.id	Kompas.id
“Solidaritas Masyarakat Sipil Tolak Rencana Perluasan Ekstraksi Pertambangan Nikel di Halmahera” (2024)	“Meski Ekonomi Tumbuh Tinggi, Kesejahteraan Maluku Utara Belum Membaik” (2024)
“Tujuh Tahun Produksi PT IWIP: Rupa Perampokan Alam di Maluku Utara Berkedok Transisi Energi” (2025)	“Maluku Utara Perlu Genjot Sektor Nontambang” (2023)
“Korbankan Lingkungan, Masyarakat Adat dan Pulau Kecil, Pegiat Lingkungan Maluku Utara Minta Bursa Efek Hentikan Perdagangan Saham Tambang Nikel” (2023)	“Pencemaran di Teluk Weda Dapat Turunkan Kepercayaan Publik terhadap Hasil Perikanan Maluku Utara” (2025)

Sumber: TitaStory.id dan Kompas.id, 2025

Di Maluku, terkhususnya provinsi Maluku Utara dan sekitarnya, pola pemberitaan dari media lokal hingga nasional menyangkut dengan isu lingkungan, selain isu pertambangan pun

membawa warna yang persis seperti hasil penelitian Remotivi. Selain menyangkut kompleksitas isu lingkungan yang rumit, bias perspektif pun sering dilakukan media-media di kota Ambon terkhususnya media mainstream seperti Siwalima, RakyatMaluku, TribunAmbon, Ambon Ekspres. Misalnya, RakyatMaluku dalam berita yang terbit pada Kamis, 5 Desember 2024, pemberitaan soal pengelolaan sampah yang berserahkan masih memakai persepektif elit, yakni anggota DPRD untuk menghimbau pemerintah kota Ambon agar mengurus Tempat Pembuangan Sementara (TPS).

Dari hasil pemeriksaan cepat oleh penulis, 4 dari 6 berita di tahun 2023-2025 soal sampah masih dominan media cenderung pada perspektif elit, dalam hal ini pemerintah dan DPRD. Ditambah tidak ada pembahasan oleh media yang secara mendalam mengkaji dan ikut mengklasifikasikan jenis sampah yang ada seperti sampah yang menjadi problem bagi masyarakat terdampak seperti sampah organik, anorganik, maupun bahan berbahaya beracun (B3).

Selain cenderung menggunakan perspektif elit, dan kurangnya kedalaman dalam memahami permasalahan sampah, media pun cenderung pada sampah yang dapat dijangkau, misalnya di berbagai sudut kota. Padahal penyebaran sampah pun tidak hanya terbatas di pusat maupun sudut kota, di daerah aliran sungai maupun laut, yang menjadi dominan mata pencarian masyarakat kota Ambon, pun harus ditelusuri. Di berbagai desa di Kota Ambon, jumlah sampah yang meningkat terdapat di 8 titik lokasi pantai. Mulai Desa Poka sebanyak 47,42%, Kate-Kate 11,73%, Hative 17,04 %, Waiher 9,28%, Lateri 4,34%, Tawiri 6,9%, Halong 2,49%, hingga Passo 0,78%. Meski tingkat kesadaran masyarakat terkait dengan meminimalisir penumpukan sampah tersebut tergolong baik, namun tidak seimbang dengan perilaku yang dilakukan (Saptenno et al., 2022). Misalnya, berdasarkan klasifikasi sampah di laut pesisir Desa Rumah Tiga, terdapat 3 jenis sampah seperti kaca-keramik, plastik, hingga logam. Masih terdapat sampah terbanyak dengan jenis kaca-keramik dengan total 232 item. (N. Chr. Tuhumury dan I. Kaliky, 2019).

Berbeda dengan pemberitaan dari Mongabay 2023, media yang fokus terhadap isu lingkungan, mencoba melihat permasalahan sampah dari daerah aliran sungai (DAS). Dari hasil penelurusan oleh Ecological Observation and Wetland Conservation (Ecoton) di tiga sungai Kota Ambon yakni Wai Ruhu, Batu Merah, dan Batu Gajah, pencemaran sampah di aliran sungai ini didominasi oleh sampah plastik. Tentu hal ini berpengaruh terhadap kualitas air, kesehatan organisme air, gangguan pada ekosistem, maupun pada manusia itu sendiri (Aqilla et al., 2023). Sedangkan di luar Kota Ambon, Pulau Seram, permasalahan lingkungan tidak melulu soal sampah. Tetapi permasalahan yang lebih besar karena berpengaruh secara sosial, ekonomi, dan politik dalam jangka panjang seperti sengketa lahan yang dikutip dari laman Forest Watch Indonesia (FWI) 2021, limbah beracun oleh PT Nusa Ina seperti laporan Mongabay 2021, hingga berita aktivitas tambang ekstraktif di Taman Jaya dari TerasMaluku 2018.

Sampai disini, pemberitaan soal isu pertambangan oleh TitaStory.id maupun Kompas.id cenderung bersikap kritis, bedanya soal kedalaman memahami isu. Tetapi penulis tidak mencoba untuk membandingkan dan memberikan ranking pada pola pemberitaan dua media tersebut. Penulis hanya ingin melihat bagaimana media-media tersebut memframing pemberitaan soal isu pertambangan di Maluku. Pembingkaiian atau framing ini kiranya penting menjadi acuan dalam mengamati kedalaman isi dan penonjolan isu-isu pertambangan dalam pemberitaan media online lokal dan nasional tersebut.

Dalam konsep framing, ada dua aspek penting untuk dilihat. Pertama, memilih fakta atau realitas. Kedua, menuliskan fakta (Eriyanto, 2011). Artinya, apa yang diberitakan oleh media adalah hasil kontruksi sosial (Hanitzsch, 2001). Dalam konteks pemberitaan isu lingkungan, yang ditulis dan ditampilkan jurnalis adalah representasi isi kepalanya. Soal kedalaman dan bias persepsi merupakan hasil kontruksi dari proses tarik-menarik budaya, sosial, ekonomi, politik, moral maupun etika dimana tempat ia tumbuh.

Penelitian dengan menggunakan metode analisis framing dalam menganalisis pemberitaan isu pertambangan sudah cukup banyak. Hal ini bisa dilihat dalam penelitian sebelumnya seperti yang ditulis Rachmi Kurnia Siregar dengan judul “Kecenderungan Media dalam Polemik Tambang Nikel Raja Ampat (Analisis Bingkai Berita Kompas.id)” (R. K. Siregar, 2025), Widia Novi Ramadianti dan Nurliah dengan judul “Analisis Bingkai Berita Tambang Ilegal di Kalimantan Timur oleh Kaltimkece.id” (Ramadianti & Nurliah, 2024), hingga Amyra Shasya Nabilla, Noer Nazwa Muharromah, dan Valentina Kusmila Putri dengan judul “Analisis Framing Berita Kasus Korupsi Timah: Dampak Kerugian Negara Rp271 pada Kompas.com dan Detikcom” (Nabilla et al., 2024). Ketiga penelitian terkait membahas isu pertambangan dengan metode analisis framing dan pendekatan kualitatif yang sama, yakni analisis framing model Robert N. Entman. Bedanya, perbedaan cakupan lokasi maupun isu seperti polemik tambang nikel Raja Ampat, dalam penelitian Siregar, dan tambang ilegal di Kalimantan pada penelitian yang dilakukan oleh Wilia dan Nurliah, dan korupsi kasus timah yang dilakukan oleh Amyra dkk.

Berdasarkan penelitian sebelumnya, peneliti menggunakan jenis kualitatif dengan pendekatan analisis framing model Robert N. Entman. Menurut penulis, metode Entman dirasa penting untuk melihat kompleksitas isu pertambangan. Tujuannya guna menganalisis bagaimana media online lokal dan nasional dalam membingkai isu pertambangan. Selain itu, TitaStory.id memiliki kedekatan yang kuat dengan komunitas lokal, memungkinkan mereka untuk mengangkat suara masyarakat terdampak secara langsung. Media ini cenderung memberikan analisis mendalam tentang dampak sosial, politik, dan ekologis dari aktivitas pertambangan, sehingga memperkaya pemahaman pembaca. Dengan keberanian untuk mengkritik kebijakan dan praktik perusahaan serta pemerintah, TitaStory.id berfungsi sebagai agen perubahan bagi masyarakat yang terpinggirkan.

Sedangkan Kompas.id memiliki jangkauan yang luas, memungkinkan isu lokal mendapatkan perhatian audiens di seluruh Indonesia. Dengan sumber daya dan tim yang berpengalaman, media ini dapat memberikan liputan profesional dan komprehensif mengenai isu-isu penting. Upaya mereka untuk menciptakan pemberitaan yang seimbang dengan melibatkan perspektif pemerintah dan perusahaan membantu memberikan konteks yang lebih luas bagi pembaca.

Dengan analisis framing, peneliti dapat mengeksplorasi variasi sudut pandang yang diberikan oleh media, baik lokal maupun nasional, terhadap dampak lingkungan dan sosial dari pertambangan. Hal ini tentu dengan pertimbangan penulis untuk melihat empat perangkat framing Entman seperti *define problem*, *diagnose cause*, *make moral judgement*, serta *treatment recommendation*. Tujuannya, memberikan kerangka yang sistematis untuk menganalisis bagaimana media membentuk pemahaman masyarakat tentang isu-isu tertentu, dalam hal ini isu pertambangan.

Selain itu, dengan metode analisis framing model Entman, peneliti dapat menemukan bias dan kecenderungan tertentu dalam pemberitaan media. Hal ini sangat penting karena bagaimana media membingkai isu dapat mempengaruhi opini publik dan kebijakan terkait pertambangan dan lingkungan. Untuk menjawab rumusan masalah kedua, peneliti melihat bahwa metode ini memungkinkan peneliti untuk menilai bagaimana suara masyarakat terdampak oleh kegiatan penambangan atau tidak berbohong dalam pemberitaan. Dengan kata lain, analisis framing dapat membantu memahami sejauh mana keterlibatan masyarakat lokal dalam narasi yang dibangun oleh media. Maka dari itu, peneliti menetapkan penelitian ini berjudul “Analisis Framing Pemberitaan Media Online Lokal dan Nasional dalam Memberitakan Isu pertambangan di Maluku”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana media online lokal *TitaStory.id* dan media nasional *Kompas.id* dalam memframing isu pertambangan di Maluku?
2. Bagaimana kecenderungan perspektif media online lokal *TitaStory.id* serta media nasional *Kompas.id* pada isu pertambangan di Maluku?

1.3 Tujuan Penelitian

Atas dasar permasalahan, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan media online lokal *TitaStory.id* dan media nasional seperti *Kompas. Id* dalam memframing isu pertambangan di Maluku.
2. Untuk menganalisis kecenderungan perspektif isu media online lokal *TitaStory.id* dan media nasional seperti *Kompas* pada isu pertambangan di Maluku.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilakukan penulis secara kualitatif dengan judul “Analisis Framing Pemberitaan Media Online Lokal dan Nasional dalam Memberitakan Isu Pertambangan di Maluku” diharapkan memberi manfaat, baik akademik maupun praktis kepada para jurnalis, Aliansi Jurnalis Indonesia (AJI), maupun seluruh insan pers di Maluku.

1. Manfaat Akademik
 - a) Diharapkan penelitian ini berguna untuk dilakukan pengembangan terkait analisis mendalam ilmu komunikasi, ilmu jurnalistik, dan kajian media dalam keterkaitannya dengan permasalahan ekologi.
 - b) Penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan di berbagai universitas untuk mengembangkan konsep media dan ekologi.
2. Manfaat Praktik
 - a) Penelitian ini diharapkan berkontribusi kepada para awak media di Maluku serta Aliansi Jurnalis Indonesia (AJI) Maluku untuk lebih memperhatikan pemberitaan isu pertambangan.
 - b) Penelitian ini diharapkan juga menjadi langkah praktis bagi para jurnalis maupun pelajar untuk saling mutual aid dalam menciptakan jurnalisme lingkungan yang berkualitas.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kajian Konsep

2.1.1 Jurnalistik

Secara defenisi jurnalisme adalah suatu praktek yang meliputi proses peliputan, pengolahan, dan penyebarluaskan informasi sesuai dengan fakta yang ada lantas didistribusikan kepada masyarakat. Di sini peran jurnalis, orang yang melakukan praktek jurnalisme menjadi penting karena menyangkut dengan penyediaan informasi yang didapatnya dari fakta (Fauzi, 2021). Sedangkan menurut Onong U. Effendi (dalam Khaer et al., 2021) jurnalisme adalah proses pengolahan informasi yang didapatkannya dari bahan yang dikumpulkan untuk disebarakan kepada masyarakat. Selain itu jurnalisme memiliki fungsi yang dapat dilihat yaitu fungsi mendidik, fungsi menghubungkan, fungsi penyalur dan pembentuk opini publik, dan fungsi kontrol sosial. Pertama fungsi mendidik merupakan fungsi dasar dari praktek jurnalisme. Hal ini karena fungsi tersebut tidak saja menyediakan informasi, tapi juga “mendikte” masyarakat dengan informasi yang ada untuk digunakan baik meningkatkan kecerdasan maupun sebagai mengatur hidup.

Kedua, fungsi jurnalisme adalah untuk menghubungkan antara masyarakat satu dengan yang lain, antara negara dengan masyarakatnya. Fungsi ini menjadi vital karena dengan ketersediaannya informasi, masyarakat bisa berpartisipasi untuk segala hal tanpa adanya sekat-sekat pemisah. Fungsi jurnalisme yang ketiga adalah sebagai penyalur atau pembentuk opini publik. Ini karena jurnalisme pada dasarnya mampu memberikan tekanan pada suatu isu sehingga apa yang dikonsumsi masyarakat menjadi perbincangan di semua kalangan. Sedangkan yang terakhir, fungsi jurnalisme adalah melakukan kontrol sosial. Fungsi ini begitu penting karena jurnalisme harus selayaknya melakukan kontrol langsung terhadap apa yang terjadi di lapangan baik itu terhadap masyarakat maupun lembaga-lembaga negara (Takalelumang et al., 2019).

Di era digitalisasi jurnalisme mengalami pergeseran paradigma yang signifikan. Perkembangan teknologi yang semakin pesat membuat pola pergeseran ini merubah gaya bagaimana berita diproduksi, disebarluaskan, bahkan dikonsumsi oleh masyarakat. Pergeseran paradigma ini juga berpengaruh terhadap profesionalisme dan kredibilitasnya. Hal ini secara otomatis menuntut proses adaptasi yang mestinya dilakukan. Dalam konteks jurnalisme, tantangan seperti hoax dan kloning menuntut jurnalisme untuk memikirkan langkah-langkah konkret untuk mengatasinya. Hal ini dapat termuat pada kode etik yang semakin disesuaikan dengan perkembangan di era digitalisasi. Selain itu juga profesi jurnalis itu sendiri yang mau dan tidak mau harus mengasah ketrampilan, bukan saja di bidang tulis-menulis, tapi juga penguasaan teknologi (Farid, 2023).

Namun sebelum sejauh ini, jika ditinjau dari sejarahnya, konsep jurnalisme di era Romawi. Konsep jurnalisme tidak pernah terlepas berbagai kepentingan entah politik maupun ekonomi. Misalnya, jurnalisme di masa pemerintahan Calius Julius Caesar (100-44 SM) yang cenderung berisi pengumuman resmi dari pemerintahan, justru menonjolkan sisi kepentingan politiknya. Hal ini bisa dilihat dari *Forum Romanum*, sebuah papan pengumuman yang tidak lebih dan tidak bukan merupakan alat propaganda yang dibagi menjadi dua, yakni *Acta Senatus* dan *Acta Diurna Populi Romawi* (Suherdiana, 2020). Hingga munculnya mesin cetak oleh Johanness Gutenberg sejak pertengahan abad ke-15, yang menandai era *the printing era of communication* (Wahjuwibowo, 2015), pun demi kepentingan para agamawan mencetak sebanyak-banyaknya kitab suci bible (Abdul, 2013).

Euforia percetakan atau jurnalisme cetak ini sebenarnya berlangsung lama sampai era internet mulai merambah sendi-sendi aktivitas manusia. Namun sebetulnya era percetakan sampai detik masih menemukan ruangnya, meskipun era internet yang begitu menjanjikan manusia dengan peralaratan cerdas yang berpadu lewat jaringan internet (Adani & Salsabil, 2019), dalam konteks jurnalistik, mulai memperlihatkan pamornya terkait dengan kontribusinya

bagi peradaban manusia. Kehadiran teknologi internet memang membuka peluang jurnalisisme yang menguntungkan. Media massa atau jurnalisisme cetak yang awalnya memakai pola tenaga manusia dalam arti manual, kini polanya berubah dengan sistem komputerisasi dan serba otomatisasi (merujuk ke digitalisasi) (Aji, 2016), cukup menambah efisiensi dalam kerja-kerja jurnalisisme.

Tapi sebagaimana ilmu, jurnalisisme pun tidak terlepas dari tarik menarik kepentingan. Berbagai kepentingan tersebut menyusup dalam karya-karya jurnalisisme. Apalagi menjamurnya media massa dan online membuat publik kembali mempertanyakan atau menggugat kredibilitas jurnalisisme. Selain itu kecenderungan jurnalisisme saat ini yang memang terjebak dalam kecepatan mencari informasi, sehingga karya atau berita yang dipublish kerap kali terburu-buru, kurang mendalam, dan tidak objektif (Lubis, Taufik Hidayat, Koto, 2020). Padahal kalau dilihat secara defenitif, berita merupakan laporan fakta (Alfianika, 2016). Tentunya fakta ini secara hakikatnya dilandasi oleh kebenaran. Namun kebenaran jurnalisisme bukan dalam tataran filosofis, melainkan tataran fungsional.

Kovach dan Rosenstiel menyebutkan jika masyarakat pada umumnya membutuhkan prosedur guna memperoleh kebenaran berita yang memiliki maksud dalam tataran fungsional. Kebenaran fungsional inilah yang dibutuhkan untuk mengatur jalan kehidupan bermasyarakat (Harsono, 2010). Sebagai contoh, seorang pejalan membutuhkan berita prediksi cuaca untuk mengambil sikap hati-hati saat bepergian, atau pemerintah membutuhkan berita terkait pedemo untuk mengatur kebijakan secara proporsional. Kebenaran fungsional memang melekat pada tubuh jurnalisisme. Ditambah tumbuh kembangnya teknologi internet atau jurnalisisme online, dalam hal ini, memaksakan jurnalisisme berubah. Makna kebenaran seakan menjadi abstrak. Berita tidak lagi dimonopoli oleh jurnalisisme konvensional seperti media cetak, radio, dan televisi (arus utama) melainkan secara universal, masyarakat mampu menjadi produsen berita lewat media sosial (Patria, 2023).

Dalam masyarakat digitalisasi, peran jurnalisisme memang menjadi tantangan tersendiri. Namun dalam tahapan ini, jurnalisisme menjadi semakin terbuka mengikuti kebutuhan masyarakat. Hal ini ditandai dengan spesifikasi topik dan gaya yang dikembangkan dalam dunia jurnalistik. Fredler (dalam Suherdiana, 2020: 60) merumuskan jurnalisisme baru ke empat tahap, yakni jurnalisisme advokasi, jurnalisisme alternatif, jurnalisisme presisi, dan jurnalisisme sastra. Sedangkan Everette menyebut jurnalisisme baru ke dalam lima jenis, yakni jurnalisisme nonfiksi baru (reportase para jurnalis), jurnalisisme alternatif, jurnalisisme advokasi, jurnalisisme bawah tanah, dan jurnalisisme presisi. Selain itu Jacob Oetama dan Atmakusumah sekedar melengkapi dengan menyebut istilah jurnalisisme baru yang lain adalah jurnalisisme empati, jurnalisisme perang/kekerasan, dan jurnalisisme damai.

2.1.1.1 Bentuk dan Gaya Jurnalistik

a. Jurnalisisme Alternatif

Menurut Christopher Atton, media alternatif merupakan media yang bersebrangan dengan media mainstream. Atton menekankan bahwa jurnalisisme alternatif berfungsi sebagai kritik terhadap media arus utama dengan menawarkan nilai-nilai dan pendekatan yang berbeda dalam peliputan berita. Atton menjelaskan bahwa media alternatif memiliki potensi untuk menciptakan ruang bagi suara-suara yang terpinggirkan dan memberikan perspektif yang sering kali diabaikan oleh media arus utama.

Jurnalisisme alternatif diposisikan sebagai bentuk media yang menantang praktik jurnalisisme mainstream dengan menawarkan perspektif yang berbeda dan lebih inklusif. Jurnalisisme alternatif fokus pada penyampaian ruang bagi suara-suara masyarakat yang sering kali terpinggirkan atau diabaikan oleh media arus utama. Ini mencakup peliputan isu-isu yang tidak mendapatkan perhatian yang memadai, serta memberikan advokasi terhadap masalah sosial yang krusial bagi masyarakat. Dalam konteks ini, jurnalisisme alternatif tidak hanya berfungsi untuk memberikan informasi, tetapi juga untuk memberdayakan komunitas dan mendorong partisipasi aktif dalam diskusi publik.

Pentingnya jurnalisme alternatif terletak pada kemampuannya untuk melibatkan masyarakat dalam proses pembuatan berita, serta menyediakan informasi yang relevan dan bermanfaat bagi rakyat. Media alternatif seperti WatchdoC Documentary, yang disebutkan dalam jurnal ini, berupaya untuk memfasilitasi dialog antara berbagai kelompok dalam masyarakat, termasuk mereka yang terpengaruh oleh kebijakan pemerintah atau kegiatan bisnis yang berpotensi merugikan. Dengan menghadirkan narasumber yang berasal dari kalangan yang terpinggirkan, jurnalisme alternatif memberikan platform bagi mereka untuk mengungkapkan pengalaman dan pandangan mereka, yang seringkali tidak disiarkan dalam pemberitaan mainstream.

Jurnalisme alternatif juga mengadopsi pendekatan yang lebih kritis terhadap kekuasaan, baik dari pemerintah maupun korporasi. Dalam hal ini, jurnalisme tidak hanya berfungsi sebagai penyampai informasi, namun juga berperan sebagai “watchdog” yang menjaga agar pemerintah dan aktor-aktor penting lainnya mempertanggungjawabkan tindakan mereka. Dengan kata lain, jurnalisme alternatif menantang narasi dominan yang sering diproduksi oleh media arus utama dan menyediakan ruang yang memuat lebih sehat di masyarakat. Hal ini penting karena dalam sistem demokrasi, keberadaan media yang independen dan kritis sangat diperlukan untuk menjamin akuntabilitas dan transparansi.

Akhirnya, jurnalisme alternatif berkontribusi terhadap pemberdayaan masyarakat dengan mengusung isu-isu lokal ke dalam ruang publik yang lebih luas. Hal ini bertujuan untuk menciptakan kesadaran masyarakat akan hak-hak mereka dan mendorong partisipasi dalam proses demokrasi. Dengan adanya media alternatif yang memberikan suara kepada mereka yang terpinggirkan, masyarakat dapat lebih memahami konteks sosial dan politik yang mempengaruhi kehidupan mereka. Dengan demikian, jurnalisme alternatif dapat menjadi alat yang ampuh untuk menciptakan ruang publik yang lebih egaliter dan akuntabel, serta mendukung terciptanya masyarakat yang lebih terinformasi dan terlibat (Riyayanatasya, 2023).

b. Jurnalisme Presisi

Jurnalisme presisi merupakan pendekatan dalam produksi berita yang mengintegrasikan metode ilmiah dan verifikasi data yang akurat. Tujuan utama dari jurnalisme presisi adalah untuk meningkatkan kredibilitas berita dan mendorong praktik peliputan yang etis, terutama di tengah meningkatnya tantangan seperti misinformasi dan dilema etika dalam jurnalisme digital. Pendekatan ini dipahami pada pemahaman bahwa wartawan harus mampu menggunakan teknik penelitian sosial dan alat analisis data untuk memberikan laporan yang lebih mendalam dan berdasarkan fakta, bukan sekadar spekulasi atau interpretasi subjektif. Dengan mengandalkan data yang valid dan proses verifikasi yang ketat, presisi jurnalisme berupaya menciptakan laporan yang dapat dipertanggungjawabkan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap media.

Melalui penerapan presisi jurnalisme, wartawan didorong untuk bekerja dalam tim yang terdiri dari berbagai disiplin ilmu, termasuk analis data dan peneliti, guna memastikan akurasi dan objektivitas dalam setiap laporan. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa jurnalisme modern harus mampu beradaptasi dengan kecepatan dan tuntutan informasi di era digital, tanpa mengorbankan nilai-nilai integritas jurnalistik. Misalnya, wartawan dari media-media ternama seperti Tempo.co, Kompas.com, dan Katadata.co.id mengakui pentingnya kolaborasi dalam menggunakan teknik penelitian yang kompleks untuk menghasilkan berita yang tidak hanya akurat tetapi juga informatif. Dengan demikian, presisi jurnalisme menjadi strategi yang sangat relevan untuk menjembatani kesenjangan antara kecepatan penyebaran informasi dan akurasi konten yang dihasilkan (Karnay et al., 2025).

c. Jurnalisme Sastra

Jurnalisme sastra merupakan bentuk penulisan berita yang mengedepankan narasi sebagai teknik utama dalam penyampaian informasi. Berbeda dari laporan berita tradisional yang sering kali fokus pada fakta secara langsung dalam format yang lebih kaku, jurnalisme sastra menggunakan gaya naratif yang lebih mendetail dan mengalir, menciptakan

pengalaman membaca yang lebih menarik bagi pembaca. Tujuannya adalah untuk menyampaikan berita dengan cara yang tidak hanya informatif tetapi juga menggugah emosi dan imajinasi pembaca. Pendekatan ini mengharuskan wartawan untuk melakukan penelitian yang mendalam dan berinteraksi langsung dengan subjek berita. Penulis diharapkan untuk menangkap nuansa, detail, dan konteks dari peristiwa yang dilaporkan, sehingga hasil akhirnya adalah sebuah laporan yang hidup dan kontekstual. Melalui cara ini, jurnalisme sastra memberi ruang bagi wartawan untuk mengekspresikan diri mereka dan menggali cerita dari berbagai sudut pandang, menciptakan lapisan makna yang lebih kaya dan kompleks dalam setiap tulisan (Suhaimi, 2011).

Jurnalisme sastra juga memiliki ciri unik yang membedakannya dari berita konvensional. Meskipun tetap berpegang pada kebenaran faktual, jurnalisme sastra menggunakan gaya bahasa yang lebih deskriptif dan simbolik, yang menjadikannya lebih menarik dan menggugah imajinasi pembaca. Hal ini memperkuat hubungan antara jurnalis dan pembaca, memungkinkan penerimaan informasi dengan cara yang lebih mendalam dan empatik. Dalam konteks literasi jurnalistik, jurnalisme sastra juga menantang asumsi terhadap perbedaan antara fiksi dan nonfiksi. Tulisan ini menunjukkan bahwa kumpulan elemen retorik dan stylistik yang digunakan dalam jurnalisme sastra juga dapat ditemukan dalam narasi fiksi, dan keduanya dapat mengalami nuansa yang sama dalam hal makna dan membaca pengalaman. Dengan demikian, jurnalisme sastra tidak hanya suatu laporan yang informatif, tetapi juga sebuah bentuk seni yang membawa pembaca masuk ke dalam situasi dan pengalaman orang lain secara lebih mendalam (Aare, 2023).

d. Jurnalisme Perang

Jurnalisme perang merujuk pada praktik pelaporan yang dilakukan oleh wartawan di daerah konflik seperti yang terjadi di Irak, Afghanistan, dan Pakistan sebagai area konflik yang berkepanjangan. Melalui penelitian terhadap persepsi para jurnalis di negara-negara tersebut, jurnalisme perang sering kali menekankan pada elemen-elemen yang bersifat sensasional, seperti jumlah korban dan kerusakan infrastruktur, yang bersifat mengedepankan sudut pandang elit. Hal ini dapat menciptakan narasi yang lebih fokus pada kekerasan dan konfrontasi, menggambarkan konflik dalam kerangka “kemenangan” atau “kehilangan,” dan mengabaikan dimensi-dimensi lebih dalam tentang dampak sosial dan psikologis terhadap masyarakat. Selain itu, jurnalisme perang sering kali dipadukan dengan jurnalisme perdamaian, di mana wartawan dapat melaporkan unsur-unsur yang lebih peka, seperti trauma dan dampak psikologis dari konflik, meskipun hal ini tidak selalu dilakukan secara aktif.

Lebih lanjut, jurnalisme perang tidak hanya mencerminkan pilihan praktik jurnalisme, tetapi juga dipengaruhi oleh konteks politik dan sosial di masing-masing negara. Meskipun ada kesadaran akan pentingnya perdamaian jurnalisme, banyak wartawan terjebak dalam paradigma pelaporan yang menekankan pada elemen-elemen visual dan kesan dramatis dari konflik. Meskipun demikian, meskipun terdapat kecenderungan untuk melaporkan dalam kerangka jurnalisme perdamaian, realitas lapangan sering kali memaksa jurnalis untuk mengambil pendekatan yang lebih berorientasi pada perang, yang menciptakan tantangan dalam menghidupkan diskursus perdamaian dalam laporan mereka (Hussain, 2021).

e. Jurnalisme Damai

Jurnalisme damai adalah pelaporan berita yang didasarkan pada prinsip-prinsip yang mendukung penyelesaian konflik, pengurangan kekerasan, dan promosi inisiatif perdamaian. Konsep ini diperkenalkan oleh Johan Galtung dan dikembangkan untuk mengatasi cara-cara melaporkan konflik yang cenderung mendorong kekerasan dan narasi sensasional. Jurnalisme damai bertujuan untuk mengedepankan aspek-aspek yang lebih konstruktif, seperti

mengungkap penyebab konflik, memberikan suara kepada masyarakat yang terpinggirkan, dan menyoroti upaya rekonsiliasi antara pihak-pihak yang berkonflik. Dengan demikian, pendekatan ini tidak hanya berfungsi untuk menyampaikan informasi, tetapi juga untuk menciptakan ruang diskusi mengenai solusi non-kekerasan (García-perdomo et al., 2024).

Pendekatan ini mengajak jurnalis untuk membuat pilihan dalam melaporkan berita, di mana mereka dapat menyoroti perspektif yang lebih luas, termasuk suara masyarakat biasa, dan tekanan kerjasama serta kesamaan di antara pihak-pihak yang berkonflik. Oleh karena itu, jurnalisme damai berusaha mengubah cara orang memahami konflik, dari pandangan yang bersifat mempertentangkan menjadi pendekatan yang lebih inklusif dan solutif. Artinya jurnalisme damai tidak hanya berfungsi sebagai alat informasi, tetapi juga sebagai sarana untuk menciptakan kesadaran kolektif dan mendorong dialog yang lebih produktif di masyarakat (Tehrani, 2002).

f. Jurnalisme Advokasi

Jurnalisme advokasi adalah bentuk jurnalisme yang bertujuan untuk mempromosikan perubahan sosial atau kebijakan tertentu dengan cara mengangkat isu-isu yang dianggap penting dan mendesak. Dalam jurnalisme ini, jurnalis tidak hanya berperan sebagai pengamat atau pemberi informasi, tetapi juga sebagai aktivis yang berusaha untuk mendukung kepentingan kelompok tertentu, masyarakat yang terpinggirkan, atau isu-isu keadilan sosial. Dalam konteks media kulit hitam, advokasi jurnalisme diakui sebagai elemen penting yang memperjuangkan isu-isu yang relevan bagi komunitas Afrika-Amerika, seperti hak asasi manusia, keadilan sosial, dan representasi yang adil. Namun, dengan munculnya konten hiburan dalam media kulit hitam, pemahaman tentang apa yang dimaksud dengan advokasi menjadi lebih kompleks.

Ada dua kategori dalam jurnalisme advokasi: advokasi keras (*hard advocacy*) dan advokasi lembut (*soft advocacy*). Advokasi keras merujuk pada analisis politik dan pelaporan tentang aktivitas aktivisme yang berhubungan langsung dengan isu-isu penting, sedangkan advokasi lembut mencakup konten yang tidak berhubungan langsung dengan politik tetapi tetap berperan dalam meningkatkan citra dan representasi masyarakat kulit hitam. Misalnya, media yang menyoroti keberhasilan tokoh kulit hitam dalam berbagai bidang dapat dianggap sebagai bentuk advokasi lembut, yang membantu memperbaiki stereotip negatif yang sering muncul di media mainstream. Hal ini menunjukkan bahwa advokasi jurnalisme tidak hanya terbatas pada konten yang eksplisit bersifat politik, tetapi juga mencakup gambaran positif yang lebih luas dari kehidupan komunitas kulit hitam.

Dalam jurnalisme advokasi, para jurnalis memperdebatkan pentingnya hiburan dalam konteks konten advokasi, dengan beberapa argumen bahwa peliputan perjuangan politik harus tetap menjadi prioritas. Namun, bagi banyak pembaca, konten hiburan yang memberikan representasi yang lebih beragam dari pengalaman hidup kulit hitam juga berfungsi sebagai advokasi. Dengan demikian, advokasi jurnalistik di media kulit hitam diakui sebagai hal yang multifaset, di mana stigmatisasi terhadap individu, representasi komunitas yang lebih positif, dan pelaporan kritis terhadap isu-isu sosial yang berinteraksi untuk membentuk cara masyarakat memahami kehidupan komunitas kulit hitam. Penyempurnaan konsep advokasi ini penting untuk memahami bagaimana media dan jurnalis dapat berfungsi secara efektif dalam menyoroti kepentingan komunitas yang terpinggirkan (Fayne, 2021).

Dalam konteks lingkungan, advokasi jurnalisme mengacu pada pendekatan yang bertujuan tidak hanya untuk melaporkan isu-isu lingkungan, tetapi juga untuk mempromosikan kesadaran dan perubahan positif. Sebagai contoh, "China Weekly" berupaya mendidik masyarakat mengenai nilai-nilai lingkungan sambil berkolaborasi dengan organisasi non-pemerintah lingkungan (NGOs), tanpa secara langsung mengkritik pemerintah. Pendekatan ini memungkinkan majalah tersebut untuk tetap relevan dalam menghadapi kendala politik

yang ada di Tiongkok, dan kritik terbuka terhadap pemerintah dapat berakhir pada konsekuensi serius (Chase, 2020).

Meskipun demikian, dalam konteks jurnalisme advokasi lingkungan, tantangan kerap hadir dalam perkembangannya. Majalah ini bertransformasi dari liputan berita umum menjadi fokus khusus pada isu-isu lingkungan, sejalan dengan tema "peradaban ekologis." Meskipun majalah ini menjalankan advokasi jurnalisme, mereka tetap menghadapi tantangan besar dari bidang ekonomi dan teknologi. Penurunan pembaca di pasar media cetak, bersama dengan kesulitan dalam memanfaatkan peluang penerbitan digital, menjadi ancaman yang signifikan bagi hilangnya "China Weekly" sebagai advokat lingkungan.

Sampai di sini, advokasi jurnalisme yang dilakukan oleh "China Weekly" cenderung bersifat non-konfrontatif, penting untuk dicatat bahwa tujuan mereka tidak hanya mengedukasi publik tetapi juga berusaha mempengaruhi kebijakan tanpa menimbulkan konflik. Melalui kolaborasi yang erat dengan LSM dan penggunaan fotojurnalisme yang kuat, "China Weekly" berusaha menciptakan kesadaran yang lebih besar tentang isu-isu lingkungan di tingkat lokal. Namun, mereka harus mempertimbangkan batasan politik dan tantangan pasar yang ada; Meskipun advokasi jurnalisme memiliki nilai penting dalam membentuk narasi lingkungan di Tiongkok, efektivitasnya dalam menghasilkan perubahan nyata pada tingkat kebijakan lingkungan masih diteliti.

2.1.2 Jurnalistik Lingkungan

Untuk memahami definisi tentang jurnalistik lingkungan, ada beberapa hal yang perlu dipahami sebagai landasan dalam merumuskan definisi tersebut. Hal-hal dasar ini; seperti jurnalistik lingkungan merupakan interaksi yang terjadi antara manusia dengan habitat lingkungannya, sebuah upaya peliputan media terhadap alam dan dampak manusia terhadapnya sekaligus mencakup dampak lingkungan terhadap kehidupan manusia itu sendiri; jurnalistik lingkungan pada hakikatnya bersifat politis; jurnalistik lingkungan secara sadar mempraktikkan jurnalisme advokasi pada isu-isu lingkungan yang mencakup sifat global dan lokal; jurnalistik lingkungan didorong oleh gerakan-gerakan lingkungan maupun organisasi yang berimplikasi dengan lingkungan; jurnalistik lingkungan berkaitan tentang persepsi dan komunikasi resiko dan krisis; jurnalistik lingkungan acapkali disejajarkan dengan gaya penulisan sains; jurnalistik lingkungan biasanya merepresentasikan cerita dengan ruang lingkup yang lebih luas (Lonsdale, 2013).

Menurut Sudibyo (2014) jurnalistik lingkungan merupakan konsep yang hadir sebagai bentuk pelaporan realitas lingkungan hidup yang terdapat di sekitar kita guna menyelamatkan lingkungan hidup itu sendiri (Dwi Ratmono & Rohmadtika Dita, 2021). Sedangkan menurut Abrar (1993) jurnalistik lingkungan hidup adalah jurnalistik yang berpihak pada kelestarian lingkungan hidup. Dalam pengertiannya, berita tentang lingkungan hidup yang dialamatkan kepada pemeliharaan lingkungan hidup untuk bisa diwarisi generasi di masa yang akan datang (Agustina, 2019). Jurnalistik lingkungan memang merupakan jurnalistik yang tidak berbeda dengan definisi jurnalistik pada umumnya. Walaupun merupakan spesifikasi terhadap bidang jurnalistik yang berfokus pada isu-isu lingkungan, ia akan selalu berdasarkan aturan, norma, prinsip, maupun etika yang ditetapkan dalam bidang jurnalistik (Khotimah, 2017).

Dalam prinsip jurnalistik lingkungan misalnya, pertama, mengutamakan kepentingan khalayak pembaca merupakan tujuan utama, dalam hal ini memberitakan isu lingkungan dengan nilai yang bermutu. Kedua, mengelaborasi lebih jauh dengan fungsi media pada umumnya, yakni watchdog dan memberikan pendidikan lingkungan hidup kepada pembaca. Ketiga, memberikan analisis untung rugi dalam suatu fenomena lingkungan hidup. Keempat, menambahkan perangkat-perangkat ekologis dalam pemberitaan bahwa manusia merupakan bagian dari lingkungan hidup. Kelima, melaporkan dengan gaya penulisan yang sederhana tanpa mengurangi sedikit pun tentang realitas sosial (Putri, 2017). Prinsip-prinsip ini tentunya harus dimiliki setiap jurnalis lingkungan. Mengingat membuat berita lingkungan secara

proporsional, mendalam dan solutif, membutuhkan ketekunan dari jurnalis lingkungan. Meski dalam banyak kasus jurnalis lingkungan paling rentan terhadap kriminalisasi, diskriminasi, dan sejenisnya.

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers mencatat jika terhadap sembilan kasus kekerasan pada 2018 hingga lima kasus pada 2019. Dengan beberapa kasus yang ada, potensi ancaman terhadap jurnalis begitu besar. Potensi inilah yang membuat LBH Pers mulai mengadvokasi keamanan terhadap jurnalis, terkhususnya jurnalis yang berfokus pada isu hak asasi manusia dan isu lingkungan hidup (Ariyanti et al., 2020). Kriminalisasi pada jurnalis memang acapkali terjadi saat proses peliputan maupun sesudahnya. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization atau UNESCO, dalam laporannya yang berjudul “Press and Planet in Danger” mengungkapkan bahwa setidaknya 749 jurnalis, kelompok jurnalis, maupun media berita telah mengalami serangkaian serangan saat meliput isu-isu lingkungan hidup di 89 negara. Insiden-insiden ini terjadi antara tahun 2009 hingga 2023 dan mencangkup berbagai wilayah di seluruh dunia (UNESCO, 2024).

Dalam penjelasan UNESCO, sebab kriminalisasi terhadap jurnalis lingkungan hidup terjadi karena beberapa hal seperti berikut: “...secara kolektif para jurnalis meliput berbagai topik dimulai dengan penyebab perubahan iklim, dalam hal ini seperti pertambangan, pengundulan hutan, dan kerja-kerja industri bahan bakar fosil, hingga isu-isu lingkungan yang punya dampak langsung terhadap masyarakat sekitar, semisal melanggar sumber daya, perampasan ruang hidup (lahan), mega proyek, dan dampak dari cuaca ekstrem”. Selain itu menurut UNESCO, aktor-aktor yang andil dalam kriminalisasi jurnalis, kelompok jurnalis, maupun media itu diantaranya aktor negara seperti polisi, militer, pegawai dan pejabat pemerintah, otoritas lokal. Selain itu ada aktor swasta seperti pihak perusahaan, preman, pengunjuk rasa dan komunitas lokal.

Apa yang terjadi pada jurnalis lingkungan bisa menjadi alarm agar jurnalis, terkhususnya yang fokus pada isu hak asasi manusia dan lingkungan hidup agar bisa lebih hati-hati dalam memulai peliputannya. Dalam peliputan lingkungan, manajemen resiko menjadi hal yang begitu penting. Karena hal ini berkaitan dengan upaya jurnalis lingkungan untuk memitigasi secepat mungkin resiko-resiko yang menanti. Dalam Buku Saku: Mekanisme Perlindungan Jurnalis Isu Lingkungan (2025), Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia mengupayakan protokol keselamatan para jurnalis lingkungan dengan memperhatikan beberapa hal terkait seperti manajemen resiko, asesmen dan pemetaan, kesadaran situasional, hingga keamanan personal (Erick Tanjung, Nany Afrida, Yudi Priyanto, 2025).

2.1.3 Isu Pertambangan

Isu pertambangan hidup merupakan isu yang berkembang tatkala manusia mulai merasakan dampak krisis lingkungan hidup yang berpotensi menggerus kehidupan sehari-hari. Masalah isu pertambangan juga timbul karena disebabkan interaksi antara aktifitas manusia dalam bidang ekonomi dan sumber daya alam (SDA) yang sebenarnya tidak seimbang satu dan lainnya. Bila semakin tinggi jumlah aktifitas eksploitasi terhadap SDA tersebut, maka dampak jangka panjang yang ditimbulkannya juga bisa mengganggu kualitas lingkungan hidup sekitar (Pujayanti, 2012). Padahal jika dicermati dengan seksama, eksistensi manusia bergantung terhadap lingkungan hidupnya. Lingkungan hidup merupakan suatu bentang alam yang saling berhubungan, timbal balik, antar manusia dengan makhluk hidup yang lain (Hengki Firmanda, Kifli Raji, 2022). Hubungan timbal balik ini karena pada asumsi dasarnya manusia adalah alam itu sendiri.

Salim Emil (1990) menurutnya, lingkungan hidup merupakan segala hal seperti benda, kondisi, keadaan, dan pengaruh yang terhadap dalam lingkungan kehidupan kita, dan dia senantiasa ikut memengaruhi hal yang ada di sekelilingnya termasuk manusia itu sendiri (Effendi et al., 2018). Sedangkan menurut Sonny Keraf, seorang Menteri Negara Lingkungan Hidup (1999-2001) lingkungan hidup merupakan konsep yang luas, bukan sekedar fisik dan

ekologis. Bagi Keraf, lingkungan hidup itu berinteraksi dengan segala aspek yang ada di dalamnya seperti aspek sosial, budaya, dan ekonomi (Ton et al., 2024). Menurutnya lebih jauh, lingkungan hidup bukan saja dipahami sebagai menjaga kelestarian lingkungan, tetapi lebih dari itu, yakni keseimbangan diantara manusia dengan alamnya, dan sekaligus keseimbangan hubungan antara manusia dengan manusia.

Namun nyatanya isu pertambangan tidak sesederhana menjelaskan secara filosofis tentang ekologis, upaya untuk mengembalikan hubungan stabil antara manusia dengan alam, ataupun manusia dengan manusia, selama praktek kejahatan terhadap lingkungan itu masih terjadi. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) mendefinisikan kejahatan terhadap lingkungan hidup adalah sebuah perlakuan ataupun tindakan yang merampas ataupun menghilangkan hak atas lingkungan hidup dan sumber lainnya yang sebetulnya merupakan ruang kehidupan masyarakat. Hal ini dilakukan dengan memaksimalkan pengaruh yang dimiliki, kekuatan modal, kekuatan politik dan kekuasaan ((WALHI), 2020). Selain itu WALHI juga melihat kejahatan dalam kacamata kriminologi sebagai kejahatan lingkungan dengan kejahatan yang lain. Karakteristik utama dalam kejahatan lingkungan itu dilakukan oleh perusahaan-perusahaan dalam arti korporasi, maupun negara.

Meskipun di tengah praktik pembangunan yang ugal-ugalan dalam merusak lingkungan hidup, banyak negara dunia pertama dan ketiga mulai mengupayakan untuk mengembalikan kelestarian lingkungan hidup dengan wacana keberlanjutan. Konsep pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development) menjadi wacana yang begitu populer tatkala komisi Brundtland menerbitkan sebuah buku "Our Common Future". Buku diterbitkan World Commission on Environment and Development (WECD) pada 1987 (Suparmoko, 2020). Salah satu alasan logis pembangunan berkelanjutan ini dilakukan guna sebagai langkah taktis menghadapi pembangunan-pembangunan yang tidak pro terhadap keadilan sosial, agar kembali kepada keadilan sosial tersebut. Buku "Our Common Future" memuat salah satu poin penting yakni, "pembangunan berkelanjutan dapat konsisten terhadap pertumbuhan ekonomi, asalkan muatan pertumbuhan tersebut mencerminkan standar etik bagi keberlanjutan dan tidak non-eksploitasi terhadap umat sesama" (Akbar, 2019).

Di Indonesia, pembangunan berkelanjutan atau sustainable development goals (SDGs) menjadi prioritas pemerintah, salah satunya tentang energi baru terbarukan. Energi baru terbarukan (EBT) menjadi isu sentral dalam konteks lingkungan hidup karena memuat kontribusi bagi masyarakat Indonesia begitu besar seperti 17% dengan komposisi Bahan Bakar Nabati, besaran 5%, Panas Bumi 5%, Biomasa, Nuklir, Air, Tenaga Surya, dan Angin 5%, serta Batubara yang dicairkan sebesar 2% (Kementerian ESDM, 2025). Komposisi yang disebutkan merupakan SDA yang cukup penting bagi kelangsungan hidup masyarakat Indonesia. Namun, komposisi EBT yang ada pun menimbulkan problematik dari sisi operasional kerja, baik itu datang dari korporasi maupun pemerintah. Sehingga konflik laten terjadi di dalam masyarakat.

Namun dalam prakteknya, wacana pembangunan berkelanjutan masih sekedar wacana yang memiliki ongkos tinggi. Makanya, untuk menjemput berbagai upaya agar pembangunan berkelanjutan bisa berjalan dengan baik, pemerintah mendorong setiap sektor pertambangan agar mempertimbangkan konsekuensi dari tindakannya dan segera memperbaharui hal-hal teknis agar pertambangan bisa lebih berkeadilan. Tapi lagi-lagi, dalam prakteknya pertambangan di Indonesia belum memberikan rasa adil bagi masyarakat sekitar. Wilayah-wilayah yang dijadikan konsesi tambang justru menjadi wilayah yang paling berpotensi terhadap kerusakan lingkungan.

Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) merilis catatan tahunan dan proyeksi tahun 2021, guna mengamati dan menganalisis dinamika tambang tersebut. Alhasil, dinamika pertambangan menyebabkan konflik, kriminalisasi, dan kekerasan yang berujung menjadi korban (JATAM, 2021). Konflik yang terjadi di masyarakat justru mengindikasikan betapa pentingnya lingkungan hidup. Makanya dalam konteks pengelolaan lingkungan hidup, pihak yang punya andil harus mengupayakan sisi berkelanjutan untuk perlindungan ekosistem alam,

penggunaan SDA terkontrol, dan pengurangan emisi gas rumah kaca, serta mengkampanyekan pentingnya energi baru terbarukan (Putro, 2024). Hal ini sebagai bagian dari menumbuhkan kesadaran ekologis sebagaimana yang dimaksudkan oleh Sonny Keraf.

2.1.4 Media Online

Media online sebenarnya menandakan pergeseran jaman. Pergeseran ini disebabkan sejak temuan teknologi yang lebih modern, yakni internet itu sendiri. Jika di jaman media konvensional terbatas dari segala sisi, maka dengan bantuan internet, media online menembus keterbatasan itu. Dengan internet, masyarakat dengan mudah mengakses informasi secara online yang ciri khasnya cepat dan mudah (Rangga Galura Gumelar, 2011). Namun apa yang dimaksud dengan media online dan apa batasan dengan media sosial kiranya perlu dipahami secara mendalam.

Media online adalah medium komunikasi yang didasarkan pada penggunaan perangkat internet (Indriyani, 2021). Media online bisa diistilahkan sebagai alat maupun sarana guna mendapatkan informasi dan hiburan. Dengan bergantung kepada perangkat internet, media online menjadi tidak terpisahkan dengannya. Internet menjadi landasan bagi kerja-kerja media online (Winda Kustiawan et al., 2022). Menurut Dewan Pers istilah media online sebenarnya memiliki pemaknaan yang sama dengan media siber atau dalam bahasa Inggrisnya disebut *cyber media*. Meski begitu, istilah media siber kalah populer dibandingkan dengan istilah media online (Suyasa & Sedana, 2020).

Media online memiliki ruang sosial yang cukup berbeda dengan media tradisional pada umumnya. Ruang publik online mempunyai potensi yang besar untuk mendorong keberagaman dan memperluas aktivitas demokrasi warga negara dengan cara yang mungkin tidak bisa dilakukan oleh media tradisional seperti media massa. Mungkin beberapa faktor ini disebabkan karena terbatasnya masyarakat untuk berkontribusi pada dinamika media tradisional (Cacciatore et al., 2012). Selain itu, karakteristik media online bisa menjadi faktor penting mengapa media online begitu digemari. Karakteristik media online bisa dilihat sebagai berikut:

1. Kecepatan Informasi

Dalam media online, internet mempunyai kekhasan yang tidak dimiliki media tradisional. Selain karena nilai kecepatan dalam mendistribusikan informasi, sekaligus aksesibilitasnya, ia juga melampaui batas-batas geografis dengan mudah.

2. Kebaruan Informasi

Ketidakterbatasan dan dapat dibuka dimana saja dan kapan saja, membuat media online mudah memperbaharui informasi yang ada sebelumnya maupun yang sedang terjadi.

3. Tanggapan Balik

Dibandingkan dengan media tradisional yang cenderung bersifat satu arah dan kurangnya sikap interaktif, media online cukup berbeda dalam hal ini. Dengan keterbukaannya, komunikasi bisa saling berinteraksi satu sama lain.

4. Personalisasi

Media online pada dasarnya menyuguhkan kebebasan. Dalam konteks media online, pengguna bebas mengonsumsi informasi apa saja yang ia mau tergantung preferensinya.

5. Kapasitas Tidak Terbatas

Salah satu hal menarik dari media online adalah data base atau bank data. Data base ini memiliki fungsi untuk menyimpan segala aktivitas kita di jagat online dalam jumlah masif. Dan komunikasi punya keleluasaan untuk mengakses kembali informasi yang disimpan sebelumnya.

6. Pranala

Informasi yang terdistribusikan lewat internet atau media online juga bisa terkoneksi dengan informasi yang lainnya.

7. Multimedia

Kapasitas media online cukup memungkinkan pembuat atau komunikastor bisa menyertakan apa saja, semisal teks, suara, gambar, bahkan video maupun perangkat-perangkat yang lain (Sugiyono & Hadi, 2020).

Dengan keistimewahan yang ditawarkan oleh media online tersebut agaknya membuat para penggunaannya tumbuh begitu pesat. Di Indonesia, Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) menyebut indeks pengguna dari periode 2024 berkisar 221.563.479 jiwa. Hal ini setara dengan jiwa populasi masyarakat Indonesia di tahun 2023 yang menyentuh angka 278.696.200 jiwa (APJII, 2024).

2.1.5 Berita

Informasi merupakan hal penting dalam realitas kehidupan. Setiap orang menginginkan informasi untuk ia gunakan sebagai landasan dalam memilih dan memilah sikapnya. Namun sudah menjadi pengetahuan publik, informasi tentu beragam. Karakteristik informasi yang beragam ini jelas bisa membantu sekaligus menyesatkan. Dalam ilmu jurnalistik, setiap informasi harus dibarengi dengan kebenaran. Ia harus memenuhi standar jurnalistik untuk bisa dikategorikan sebagai informasi yang layak dibaca semisal, harus memenuhi unsur 5W+1H. Dalam ilmu jurnalistik informasi yang terstandarisasi dengan unsur-unsur yang berlaku disebut sebagai berita. Berita adalah realitas lapangan. Realitas atau fakta itu dikumpulkan, ditulis, dan dikonstruksi oleh jurnalis lantas didistribusikan melalui medium yang diistilahkan sebagai media massa (Lubis, Taufik Hidayat, Koto, 2020). Berita ditulis dengan basis atas realitas sosial, entah sebagai suatu peristiwa yang tidak direncanakan, ataupun sebagai wacana yang disengajakan muncul dengan basis perencanaan (Halim, 2015).

Namun berita tentu tidak dibuat secara sembarangan. Meski ia hasil konstruksi jurnalis atau media, ia patut diuji kelayakannya. Kelayakan dalam informasi atau berita ini lah menjadi aras bahwa tidak semua informasi bisa diberitakan, sebab mau tidak mau, harus memiliki nilai berita. Menurut Sallot, Steinfatt, dan Salwen (1998) nilai berita meliputi ketepatan fakta, menarik untuk dibaca, berguna bagi pembaca, kelengkapan, publikasi tepat waktu, pemaparan masalah dengan baik, tata bahasa yang tepat, keadilan atas perbedaan pandangan (Maha Rani, 2013). Shoemaker dan Reese (2014) juga menyebut nilai berita sebagai berikut: ketepatan waktu, elititas, personalisasi, superlatif, tidak terduga, kedekatan, dampak, negativitas, dan harmoni (Nurwulan & Nurul, 2020).

Walaupun banyak perdebatan soal nilai berita, ia tetap menjadi pendoman kerja bagi para jurnalis di berbagai jenis berita yang dilakukan. Jenis berita bisa dilihat sebagai berikut: Pertama, berita langsung. Jenis berita langsung merupakan berita yang ditulis berdasarkan apa yang terjadi saat itu. Gaya penulisannya singkat dan tidak bertele-tele. Kedua, berita mendalam. Jenis ini biasanya memerlukan waktu yang lebih dalam mendalami suatu isu atau peristiwa. Dia mengorek lebih jauh, bukan sekedar yang ada di permukaan.

Ketiga, berita investigasi merupakan jenis berita yang paling berat. Ia dikembangkan berdasarkan hasil-hasil penelitian mendalam atau pelacakan berbagai sumber untuk memperoleh informasi yang akurat dan kritis. Keempat, Interpretatif News atau berita interpretatif. Jenis berita ini bukan memadukan opini jurnalis dalam suatu berita. Melainkan merekonstruksi suatu berita berdasarkan kekritisannya jurnalis dalam memaknai suatu peristiwa. Kelima, berita opini. Jenis berita ini berangkat dari opini para cendekiawan, ahli, atau pejabat mengenai realitas (Bangun et al., 2019).

2.1.6 Media Nasional dan Lokal

Dengan membahas apa itu media online dan apa saja karakteristiknya sebelumnya, dapat dengan mudah kita mengidentifikasi dan melihat bagaimana perkembangan media online tersebut di setiap wilayah akhir-akhir ini. Apalagi dengan kemudahan mengelola media online karena tanpa memiliki alat yang memadai pun, siapa saja bisa mendirikan sebuah situs media online. Awal-awal tahun 2000an di Indonesia, ketika berbagai situs online tumbuh begitu

pesat dan rontok satu per satu pada waktu yang fluktuatif, prospek bisnis media online ini terlihat cerah. Kabar gembira ini sebetulnya disinyalir datang dari penetrasi para pengguna internet di Indonesia (Margianto & Syaefullah, 2012). Media sebagai industri sebenarnya telah diutarakan oleh Croteau dan Hoyner (2013) jika pada hakikatnya media memiliki input berupa informasi yang bisa diproses menjadi informasi yang bernilai ekonomis (Septiantoro et al., 2018).

Berkembangnya industri media online di seluruh Indonesia dari tingkat nasional ke tingkat lokal justru menambah dinamika media. Media online pada dasarnya membuat perbedaan tipis apa itu media nasional dan media lokal. Media nasional memang pada dasarnya merupakan media yang memiliki jangkauan yang lebih luas. Dia bisa saja mencakup seluruh wilayah negara dan cenderung terlibat pada isu-isu yang besar dan berdampak pada skala nasional. Sedangkan media lokal dia terbatas secara geografis tertentu, seperti kota ataupun provinsi, dengan sesekali meliput isu global. Perkembangan isu-isunya pun lebih menyoroti tentang apa yang terjadi di lingkungan setempat (KataLokal, 2025).

Ashadi Siregar (2002) menyebutkan jika istilah media nasional, regional, dan lokal sebenarnya menandakan dikotomi antara pusat dan daerah. Padahal pembagian seperti ini sebenarnya masih kabur. Banyak media dengan berlokasi di ibu kota negara seperti Jakarta, bisa saja mempunyai lingkup sirkulasi dan orientasi pemberitaan hanya seputar Jakarta saja. Hal ini tidak menutup kemungkinan di media-media yang lain (A. Siregar, 2002). Dikotomi media nasional dan media lokal memang masih menimbulkan sisi problematik. Dalam era digitalisasi misalnya, aksesibilitas informasi bisa diperoleh dari sumber mana saja. Baik itu di tingkat nasional, regional, maupun lokal itu sendiri. Begitu pun dari sisi sirkulasi oplah dan orientasi isi yang bisa saja berlainan. Misalnya, media yang (Z) sirkulasinya lokal memiliki orientasi (X) nasional.

Tabel 2. Kerangka Dikotomi Media Nasional, Regional dan Lokal/Ashadi Siregar

	Nasional	Regional	Lokal
Sirkulasi	X	Y	Z
Orientasi	X	Y	Z

Sumber: <https://share.google/zB6DrDFyfdHuqLHBG>

Keterangan: (X-X): sirkulasi dan orientasi nasional
 (Y-Y): sirkulasi dan orientasi regional
 (Z-Z): sirkulasi dan orientasi lokal

2.2 Kajian Teori

2.2.1 Teori Konstruksi Realitas Sosial

Teori ini diperkenalkan oleh Peter L. Belger dan Thomas Luckmann. Dalam buku mereka yakni Tafsir Sosial Atas Kenyataan: Risalah tentang Sosiologi Pengetahuan (2018) dijelaskan jika realitas sosial merupakan tindakan dan interaksi yang dilakukan individu maupun kelompok dalam aktivitas sosial. Apa yang dilakukan baik individu maupun kelompok ini membentuk suatu kenyataan yang terstruktur dan terpola. Makanya, menurut mereka bahwa dunia adalah sesuatu yang berdiri dari berbagai akumulasi kenyataan (Belger & Luckmann, 2018: 30). Artinya, realitas bukan sesuatu yang dibentuk secara alamiah, melainkan dari hasil konstruksi (Murti Ali Lingga & Hamdani M.Syam, 2018).

Munurut Eriyanto (2011) paradigma konstruksi realitas sosial mempunyai asumsi dasar jika masyarakat adalah produk manusia, dan akan kembali kepada penghasilnya. Artinya, manusia adalah produk dari masyarakat itu sendiri (Eriyanto, 2011). Inilah proses dialektis yang terjadi di dalam realitas sosial. Saling pengaruh antara individu dan masyarakat mengidentifikasi jika realitas adalah konstruksi semata.

Teori tersebut juga merupakan keyakinan dan bentuk penerimaan bahwa semua hal yang terdapat dalam kesadaran, dan cara berinteraksi dengan orang lain itu didasarkan pada ajaran kebudayaan dan masyarakat (Ngangi R., 2011). Karena menurut paradigma konstruksi sosial jika realitas merupakan hasil konstruksi, maka realitas bersifat subjektif. Subjektivitas ini bergantung pada gambar diri aktor-aktor yang terlibat di dalamnya untuk menilai realitas itu sendiri (Riduwan & Andayani, 2019). Peter L. Berger dan Thomas Luckmann menyebut bahwa di dalam realitas, proses konstruksi itu terjadi melalui tiga tahapan penting dalam paradigma konstruksionis, yakni tahapan eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi. Dalam tahapan yang pertama, eksternalisasi, dunia ibaratkan wadah penampung segala macam ekspresi manusia. Manusia mengekspresikan (eksternalisasi) dalam bentuk-bentuk maupun simbol-simbol agar eksistensinya tetap ada.

Tahapan yang kedua, objektivasi, bagi Berger dan Luckmann adalah hasil dari eksternalisasi. Apa yang terekspresikan dari tingkah laku manusia dalam realitas kelak akan menjadi sesuatu yang objektif. Sebagai contoh, manusia menciptakan bahasa sebagai alat komunikasi antara satu sama lain. Komunikasi berguna untuk menghubungkan dua atau lebih dalam menciptakan kesepahaman. Bahasa yang awalnya sebagai alat lantas menjadi sesuatu yang objektif. Dia tercipta oleh manusia tetapi bisa juga menciptakan manusia.

Sedangkan tahap ketiga, internalisasi, dalam bahasa Eriyanto, internalisasi merupakan proses penyerapan kembali dunia objektif. Hal ini dilakukan karena hasil eksternalisasi sebagai batu loncatan membuat manusia secara tidak langsung kembali menerima hasil dari dunia objektif itu. Misalnya, seorang anak akan mempelajari suatu bahasa dalam konteks bahasa yang terkait erat dengan budaya sekitarnya. Ini dilakukan karena dia menyerap dunia objektif yang ada di sekitarnya dengan bantuan orang tuanya.

Dalam post truth-era (zaman pasca kebenaran), fakta tidak lagi menjadi dasar penilaian informasi benar atau salah, tetapi berdasarkan apakah informasi tersebut sesuai dengan keyakinan personal atau tidaknya. Fenomena ini diperparah dengan asumsi masyarakat yang cenderung menerima informasi yang tersebar dalam era digitalisasi hanya dengan pertimbangan aspek emosional (Wahyono, S. B, Murti Kusuma Wirasti, 2020). Pendapat di atas dibenarkan oleh *The Cambridge Dictionary* yang lebih mendefinisikan *post truth-era* dengan mendeskripsikan dimana orang menyakini suatu informasi bukan berdasarkan berbasis pada fakta, melainkan kepada keyakinan semata (Budi Gunawan & Barito Mulyo Ratmono, 2019: 138).

Apalagi dalam konteks media, konstruksi realitas menjadi niscaya. Menurut Gaye Tuchman (1980) menyebutkan media kerap kali melakukan konstruksi terhadap realitas yang ada dengan memengaruhi pendapat dan sikap masyarakat beserta batasan-batasannya. Hal ini karena berita dapat dianalogikan sebagai jendela. Menurut Tuchman, jendela (bingkai) bergantung pada apakah jendela itu besar atau kecil, memiliki banyak panel atau sedikit, menghadap jalan lurus, atau halaman belakang. Ini bergantung pada cara kerja media dan profesionalitas jurnalisnya. Berdasarkan hasil penelitiannya, Tuchman menunjukkan bahwa para profesional yang bekerja, manajer, atau pemilik sering kali bersaing satu sama lain untuk mengendalikan cara kerja berita. Menentukan bagaimana pekerjaan akan dilakukan (Tuchman, 1980: 1-5).

Di Indonesia pemberitaan media kadang mengikuti wacana dominan dari kelompok-kelompok yang mempunyai otoritas. Salah satu contohnya bisa dilihat bagaimana media mengonstruksi kelompok anarkisme sebagaimana yang dijelaskan di dalam buku yang diterbitkan penerbit Lokataru dengan judul "Kaus Hitam dan Paranoia Negara: Stigmatisasi dan Pelanggaran Hak Anarko-Sindikalisme":

"...Kabar ini disusul dengan berbagai pemberitaan di media yang seakan mengonfirmasi cap 'perusuh' yang disematkan Jenderal (Tito Karnavian) yang kini menjabat Menteri Dalam Negeri tersebut" (Hal-10) (Anjani, 2020).

Artinya, dalam teori konstruksi sosial, media sebagai agen konstruksi menjadi hal vital dalam membentuk wacana publik. Misalnya, pandangan anarkisme sebagai contoh kerap kali diberitakan oleh media dengan pandangan yang bias. Jurnalis yang tumbuh di lingkungan yang tegas dengan pandangan anti-anarkis (internalisasi) tentu akan menolak dan bisa saja menulis (eksternalisasi) sesuai dengan aturan maupun norma yang mengikatnya (objektifikasi). Alhasil, berita yang dihasilkan atas konstruksi media adalah hasil peristiwa. Berita adalah upaya merekonstruksi kerangka atas peristiwa yang terjadi. Upaya ini karena disesuaikan dengan berbagai acuan baku yang ada di dalam masyarakat dengan berbagai pertimbangan ekonomi, politik maupun budaya setempat (Kamaruddin, 2016).

2.2.2 Teori Agenda Setting

Secara harfiah, teori tersebut sebuah pengaturan agenda. Agenda itu sendiri, secara etimologi berarti “buku catatan” atau “acara”. Terminologinya, agenda setting termasuk dalam bagian agenda yang terselubung. Atau suatu agenda yang tidak secara eksplisit mengemukakan sesuatu (Efendi et al., 2023). Teori agenda setting mengasumsikan jika media massa memiliki daya untuk mempengaruhi agenda publik. Hal ini membuka konsekuensi bahwa apa yang diberikan media merupakan hal penting yang harus dipikirkan (Christiany, 2019). Seturut dengan definisi di atas, teori agenda setting menempatkan sebuah isu yang dianggap penting untuk mempengaruhi khalayak. Hal ini bertujuan untuk mengarahkan suatu isu agar dianggap penting (Permana & Iffah, 2021).

Dalam konteks media, agenda setting diasosiasikan dengan agenda media. Setiap media memiliki agendanya sendiri termasuk dalam hal mengelola media itu. Teori ini sebenarnya dikemukakan pertama kali oleh Walter Lippman, seorang jurnalis Amerika Serikat pada 1922. Teori ini pada dasarnya cukup berpengaruh dan berperan penting dalam proses untuk memframing suatu berita sehingga berita itu dianggap penting dalam wacana publik (Hadi S et al., 2021).

Namun teori agenda setting ini mulai menemukan ruangnya sejak tahun 1972, ketika Maxwell McCombs dan Donald L. Shaw melakukan survei pemilih di California Utara selama pemilihan kepala negara di Amerika Serikat pada 1968. Kedua pemikir itu meyakini jika media massa pada saat itu memiliki kekuatan untuk mengatur sebuah berita yang diagendakan untuk mempengaruhi agenda publik. Menurut mereka, media massa mampu membuat suatu berita terlihat penting dan berita lainnya tidak penting (Ritonga, 2018). Menurut McCombs masyarakat akan beranggapan jika suatu isu atau fenomena itu penting apabila media massa mulai memberitakannya. Anggapan ini karena kekuatan media massa untuk mempengaruhi (Shabira et al., 2021).

Selain itu pada tahun-tahun selanjutnya, teori framing banyak digunakan untuk tujuan penelitian dengan asumsi bahwa media massa banyak membentuk agenda publik. Penelitian-penelitian dengan menggunakan teori agenda setting juga mengkategorisasikan wilayah penelitian yakni, media menginformasikan warga mengenai topik agenda, dan bagaimana warga berpikir mengenai masalah dalam kerangka agenda media (Astari, 2021).

Teori agenda setting dalam hal ini dapat dikategorikan menjadi tiga. Pertama, agenda media, agenda publik, dan agenda kebijakan. Dalam agenda publik, opini publik itu dipengaruhi oleh media massa. Hal ini terkait bagaimana media mengatur wacana publik. Sedangkan agenda media, penekanannya justru pada bagaimana media mengelola, dalam hal ini mendefinisikan suatu isu, menyeleksinya, bahkan memberikan penekanan-penekanan tertentu untuk sebuah isu. Yang terakhir merupakan agenda kebijakan yang cenderung berkaitan dengan langkah taktis. Agenda kebijakan ini terjadi karena relasi antara opini publik dan kebijakan elit. Bagaimana kebijakan itu terbentuk dari hasil agenda yang diatur (Nasionalita, 2014).

Mengenai cara kerja teori ini, kiranya ada dua tingkatan penting yang perlu dilihat. Pertama, menentukan isu yang diklaim penting. Kedua, mendeskripsikan setiap bagian-bagian dari isu tersebut (Dirgantoro & Muksin, 2024). Sebagaimana dalam konteks pemberitaan media

di Indonesia akhir-akhir ini, beberapa media kerap menyampaikan jika program Presiden Prabowo mengenai makan siang gratis (MSG) adalah hal utama. Tapi di samping itu, permasalahan pendidikan di daerah semisal Papua merupakan isu yang berada dalam posisi kedua. Pada titik ini, pengaturan agenda adalah teori yang mempengaruhi tingkat pengaruh media massa pada prioritas minat yang dipertanyakan.

2.2.3 Teori Framing

Analisis framing merupakan pendekatan yang kerap kali digunakan dalam kajian media. Hal ini karena analisis framing dipakai guna mencermati bagaimana media mengonstruksi realitas. Teori framing merupakan teori yang kerap kali dipakai dalam setiap aktivitas keseharian. Menurut Erving Goffman (dalam Riadi & Drajat, 2019), teori framing digunakan dalam kehidupan sehari-hari karena merupakan bagian bagaimana individu melakukan penafsiran terhadap konsep desain framing sendiri. Selain itu juga framing memahami kecenderungan posisi media itu sendiri. Sedangkan menurut Eriyanto (2002: 261) framing bisa lihat juga sebagai pendekatan untuk mengidentifikasi bagaimana perspektif dipakai oleh jurnalis untuk menyeleksi isu dan menulis berita yang bermuara pada pengklasifikasian fakta yang ditonjolkan, dan sebagian dihilangkan (Siswanti, 2019).

Eriyanto (2011) juga menulis bahwa dalam penelitian framing, yang menjadi pangkal soal adalah tentang realitas yang diatur oleh media (Eriyanto, 2011: 7). Menurut Robert N. Entman (dalam Pinontoan & Wahid, 2020) proses framing merupakan cara bagaimana proses seleksi terhadap realitas membuat bagian-bagian tertentu lebih menonjol diantara yang lain. Sebagaimana dijelaskan Entman, konsep framing pada hakikatnya melibatkan pemilihan dan penonjolan (Entman, 1993). Hal ini dilakukan sebagai upaya memberikan penekanan pada poin-poin tertentu sehingga berpengaruh terhadap cara masyarakat memahami realitas.

Konsep framing sebenarnya diperkenalkan pertama kali oleh Beterson sejak 1995. Penggunaan konsep framing tidak lain adalah sebagai perangkat yang membantu mengorganisir persepsi politik, aturan, maupun opini publik dalam realitas sehari-hari. Hal ini mendorong Goffman (1974) untuk mengandaikan jika konsep frame sebagai potongan-potongan tingkah laku yang mendikte masyarakat dalam membaca realitas (Hanifah, 2019). Lebih jauh, konsep framing dalam konteks komunikasi juga menjadi langkah yang signifikan. Para cendekiawan menggunakan konsep framing ini sebagai upaya untuk mengidentifikasi tren, menutupi liputan di berbagai outlet media, dan atau melacak variasi di antara jenis media (Chong & Druckman, 2007).

Lantas konsep framing pun berkembang. Dalam kajian ilmu komunikasi, framing menjadi metode yang paling banyak digunakan untuk melihat dinamika media, terkhususnya bagaimana berbagai media tersebut membingkai suatu berita. Alhasil, penggunaan berbagai model framing seperti model Robert N. Entman, Zhongdan Pan & Gerald M. Kosicki, Murray Edelman, William A. Gamson & Andre Modigliani menjadi pilihan yang menarik ketika memakai pendekatan framing tersebut. Namun terdapat berbagai perbedaan di antara para pemikir di atas baik menyangkut definisi maupun metodenya. Seperti Muraay Edelman melihat framing sebagai kategorisasi. Menurutnya kategori membantu manusia memahami kompleksitas realitas ke dalam kategori sehingga mempunyai makna (Eriyanto, 2011: 186-187).

Selain itu framing juga memiliki efek tertentu. Menyangkut dengan bagaimana realitas dipahami, framing punya pengaruh cukup besar terhadap mobilisasi massa. Dalam aksi demonstrasi, pemicunya kerap kali dimulai dari bagaimana media menojolkan realitas. Sehingga pembaca terdorong untuk bukan sekedar membaca, tapi juga bertindak. Sebagai contoh, framing media pada aksi Oktober 2025 lalu dengan menonjolkan pendapat Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) justru menyulut kemarahan masyarakat. Selain itu juga menggiring masyarakat pada ingatan tertentu. Semisalnya seorang reporter Kompas TV dengan menyebut para demonstran sebagai "musuh" tentu akan membangkitkan pemahaman masyarakat terkait

bagaimana media hari-hari ini memiliki pola serupa dengan media di era Orde Baru yang kurang lebih sebagai kaki tangan pemerintah.

2.2.4 Teori Priming

Konsep priming sebenarnya berasal dalam kajian psikologi sosial dan kognisi. Konsep ini bertujuan untuk menggambarkan bagaimana memori manusia merespon atau mengasosiasi sesuatu dari stimulus yang ia terima. Dalam psikologi sosial, proses priming ini didefinisikan sebagai suatu bentuk penilaian yang diinisiasi oleh memori atau pengetahuan seseorang yang tersimpan (Williams, 2021).

Sederhananya, teori priming mengasumsikan jika penggambaran media dapat memberikan respon dengan mengaitkan informasi yang diterima dengan sesuatu yang sudah dulu dikenalnya. Jika seseorang memikirkan “aksi demonstrasi” secara tidak langsung seseorang tersebut akan mengaitkannya dengan konsep-konsep yang ia peroleh sebelumnya, semisalnya tindakan anarki, maupun brutalitas polisi.

Dalam konteks media, ini berawal dari Berkowitz dan Rogers pada 1986. Menurut mereka, dampak pemberitaan media memberikan efek terhadap pikiran dan tindakan seseorang secara temporer dan jangka pendek (Bachtiar et al., 2016). Katakanlah ketika sedang menonton film tentang teroris, secara tidak langsung film tersebut bisa mempengaruhi cara kita berpikir dan bertindak. Dalam konsep priming, lantas ketika nantinya suatu saat media meliput isu mengenai teroris, kita akan cepat mengasosiasikannya dengan konsep “kekerasan” yang kita miliki dalam memori sehingga kita melakukan penilaian atas isu tersebut.

Priming merupakan proses bagaimana media menfokuskan isu tertentu di samping isu-isu yang lain sehingga cenderung memberikan penilaian atau tindakan evaluatif terhadap isu tersebut (Rianto, 2010). Istilah priming juga bisa saja dilihat sebagai metode untuk mengamati bagaimana keterpengaruhannya berita pada masyarakat, mendorong suatu tindakan evaluasi yang diberikan kepadanya dengan mengaitkan konsep-konsep yang ia temui sebelumnya. Misalnya, untuk melihat bagaimana berita di TV membentuk penilaian masyarakat terhadap presidennya ditentukan berdasarkan cara masyarakat didikte untuk menikmati berita yang terus berulang, dan sekaligus aksesibilitas berita bagi masyarakatnya (Iyengar et al., 1984).

Teori priming juga memiliki sistem kerja yang terbagi dalam tiga perangkat. Pertama perangkat primed, yakni kehadiran stimulus merupakan pemicu ke dalam suatu penilaian/asosiatif yang nantinya diberikan oleh individu terhadap sesuatu. Kedua, stimulus yang hadir kerap kali berpengaruh terhadap konsep, tindakan evaluasi dengan mempertimbangkan pengetahuan masa lalu mengenai isu yang ada pada media tersebut. Sedangkan pada perangkat ketiga, apa yang berulang oleh pemberitaan mengenai isu tersebut secara tidak langsung mempengaruhi untuk melakukan suatu tindakan (Savitri & Purnama, 2021).

Selain itu, dalam literatur komunikasi politik, teori priming memiliki kaitan yang erat dengan teori framing maupun agenda setting. Hal ini karena priming, katanya, merupakan konsekuensi langsung dari kedua teori sebelumnya. Dalam penelitian yang pernah dilakukan, priming dapat terjadi ketika konten berita menyarankan kepada audiens bahwa mereka seharusnya menggunakan isu tertentu sebagai tolak ukur untuk menerangi kinerja pemimpin dan pemerintah (Scheufele & Tewksbury, 2007).

Priming terjadi melalui hasil dari agenda media dan framing yang dilakukan. Hal ini turut membuat informasi menjadi hal yang kerap kali memiliki intensitas yang tinggi untuk mempengaruhi seseorang dengan membuat isu-isu yang digunakan menjadi terlihat penting.

2.3 Penelitian Terdahulu/Literatur Review

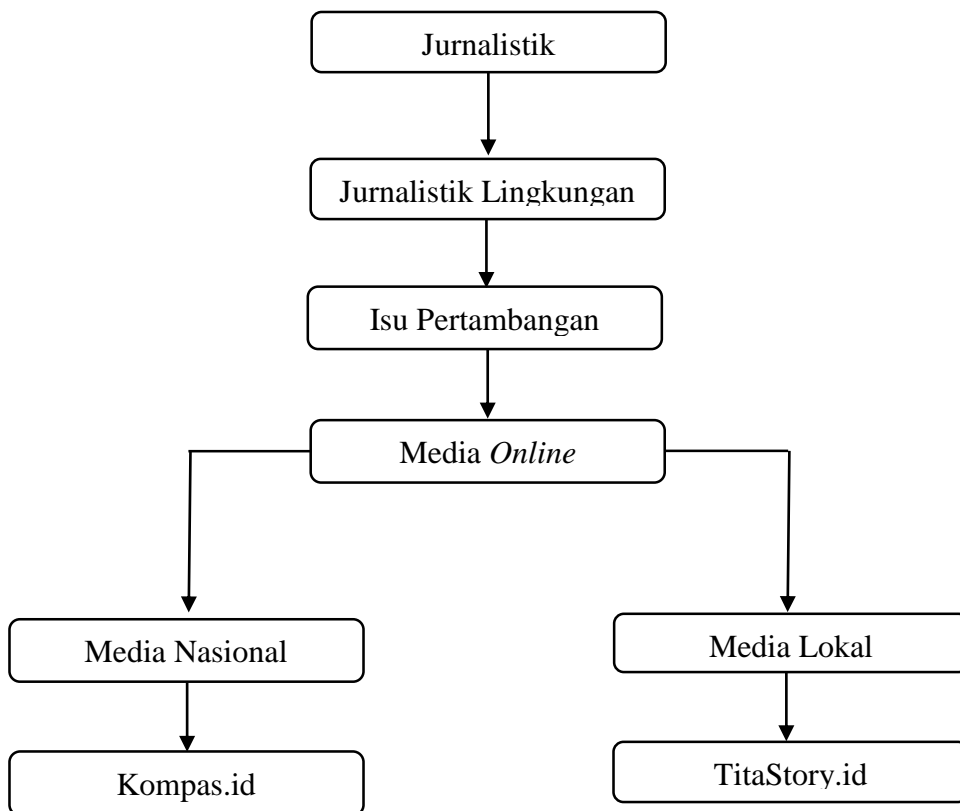
Mengenai isu pertambangan yang dianalisis dalam metode analisis framing sebenarnya banyak bisa temukan di beberapa penelitian sebelumnya. Hal ini dikarenakan dengan konsep framing, para penulis ingin mengetahui permasalahan bagaimana media baik nasional maupun lokal dalam membingkai sebuah berita tentang isu pertambangan. Beberapa penelitian ini bisa

menjadi contoh: Pertama, penelitian oleh Rahcni Kurnia Siregar dengan judul “Kecenderungan Media dalam Polemik Tambang Nikel Raja Ampat (Analisis Bingkai Berita Kompas.com)”. Tujuan penelitiannya menganalisis bagaimana media Kompas.com terkait memframing isu tambang di Raja Ampat. Metode penelitiannya adalah kualitatif deskriptif pendekatan analisis framing model Robert N. Entman. Hasil penelitian menunjukkan, pertama, media Kompas.com cenderung mengambil kalangan masyarakat dan akademisi untuk menyuarakan tuntutan publik. Kedua, upaya media untuk menyuarakan Raja Ampat agar dijaga ekosistemnya.

Kedua, analisis pemberitaan isu lingkungan bisa dilihat dalam penelitian dengan judul “Analisis Bingkai Berita Tambang Ilegal di Kalimantan Timur oleh Kaltimkece.id” oleh Widia dan Nurliah. Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis pemberitaan oleh Kaltimkece.id mengenai tambang ilegal di Kalimantan. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, dengan pendekatan analisis framing Robert N. Entman. Hasil penelitiannya menunjukkan jika Kaltimkece cenderung menonjolkan isu mengenai tambang ilegal di Kalimantan, dan jelas berpihak pada pemberitaan tersebut.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Amyra dkk dengan judul “Analisis Framing Berita Kasus Korupsi Timah: Dampak Kerugian Negara Rp271 pada Kompas.com dan Detik.com”. Tujuannya untuk menganalisis tentang kasus Harvey Moeis dalam industri timah yang dituduh sebagai pelaku korupsi. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan model Robert N. Entman. Hasil penelitian menunjukkan jika bahwa Kompas.id cenderung memdefenisikan masalah dengan jelas dan gamblang. Serta memberikan informasi yang mendalam mengenai dampak ekonomi atas korupsi timah tersebut. Sedangkan Detik.com lebih kepada fokus pemberitaan yang aktual dengan berbagai penekanan pada konteks dan perkembangan terkini mengenai kasus tersebut.

2.3 Kerangka Pikir



3. Definisi Operasional

1. Analisis Framing

Analisis framing merupakan proses analisis untuk melihat bagaimana media pada umumnya menkonstruksi sebuah informasi atau berita. Ini mencakup analisis terhadap perangkat-perangkat terkait dalam pemberitaan seperti pilihan kata, gambar, narasi, dan konteks yang digunakan dalam sebuah berita.

2. Media Online

Platform digital yang menyediakan informasi dan berita melalui internet, termasuk situs berita, blog, dan media sosial. Dalam konteks ini, media online mencakup media lokal dan nasional yang beroperasi di Maluku.

3. Media Lokal

Media online yang fokus pada berita dan isu yang relevan dengan komunitas dan masyarakat di Maluku. Ini mencakup outlet berita yang beroperasi secara regional dan memiliki pengaruh langsung terhadap audiens lokal.

4. Media Nasional

Media online yang beroperasi di tingkat nasional dan mencakup berita dari berbagai daerah, termasuk Maluku. Media ini memiliki jangkauan yang lebih luas dan fokus pada isu-isu yang berdampak pada masyarakat secara keseluruhan.

5. Isu Pertambangan

Topik atau masalah yang berkaitan dengan isu pertambangan bisa merujuk pada sejumlah masalah dan tantangan yang muncul akibat aktivitas ekstraksi sumber daya mineral, termasuk dampak lingkungan yang merusak, konflik sosial dengan masyarakat lokal, ketergantungan ekonomi yang berisiko, serta berbagai kebijakan dan pencegahan yang seringkali melemah.